

ANALISIS DAMPAK KEMITRAAN PERIKANAN TANGKAP TERHADAP KONDISI EKONOMI WILAYAH

YOISYE LOPULALAN*)

*) Staf pengajar Univ.Pattimura

Abstract : *The usage of fisheries resources has not been optimum since it is dominated by small scale corporation which is also facing many constraints in capital, institution, management, technology and information aspects. To solve some of the problems partnership is an urgent factor because it touches the needs of the fishermen. The assistance from many stakeholders, both government and private sectors, is needed in the partnership and not only limited for the capital assistance but also consultation and guidance as well as the market. One of the community efforts in captured based fisheries in Nusaniwe sub district needs to be supported and improved through the partnership is the "purse seine" based fisheries. The utilization of the purse seine tool has good prospectus due to the fact that pelagic resources and productions are high. The development of the effort is sure can improve the income that will have impact on the welfare of the fishermen. The study aimed to investigate the effect of captured based fisheries partnership towards the economic conditions in Nusaniwe sub district. The result is expected can be used as information and consideration for the government in making decisions in fisheries development. Data is collected through a survey and were analyzed using Policy Analysis Matrix from Monke and Pearson (1989). The results shows positive effect in social and economic of the fishermen participants and the community with profitable value of 272.583.549 IDR, social profitable value of 343.689.360 IDR and domestic resources coefficient <1 (DRC = 0.52).*

Keyword : *Partnership, economic conditions, Nusaniwe sub district*

PENDAHULUAN

Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan, dikarenakan usaha perikanan masih didominasi oleh usaha-usaha yang berskala kecil dengan berbagai kendala yang dihadapi menyangkut aspek permodalan, kelembagaan dan manajemen, teknologi, dan informasi. Untuk itu program kemitraan merupakan hal yang urgen, karena program kemitraan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan.

Bantuan dalam bentuk kemitraan usaha yang diberikan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta sangatlah diperlukan, tidak hanya terbatas pada modal usaha tetapi penyuluhan maupun bimbingan

dan pengamanan pasar produknya. Dalam program kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan) sering mengedepankan aspek sosial (kesejahteraan nelayan), tetapi pertimbangan keuntungan ekonomi jauh lebih dominan. Sebab misi utamanya adalah meraih keuntungan dari setiap hubungan bisnis yang tercipta, tidak terkecuali pada nelayan kecil. Dengan demikian syarat utama menjamin keberlanjutan usaha adalah nelayan harus memiliki kemampuan yang memadai guna memenuhi harapan pihak perusahaan.

Salah satu jenis usaha perikanan rakyat dalam bidang penangkapan yang perlu didukung dan dikembangkan melalui program kemitraan adalah perikanan *purse seine*. Penggunaan alat tangkap *purse seine*

di Maluku memiliki prospek yang baik, karena didukung oleh potensi sumberdaya pelagis yang cukup tinggi dan memiliki tingkat produksi yang cukup besar. Pengembangan usaha ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup nelayan.

Kecamatan Nusaniwe merupakan daerah pesisir pulau Ambon dimana sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Salah satu usaha penangkapan ikan oleh nelayan di daerah ini adalah dengan menggunakan *purse seine*. Nelayan *purse seine* pada wilayah kecamatan Nusaniwe memperoleh bantuan modal investasi lewat program kemitraan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon) melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Penelitian ini bertujuan menelaah dampak program kemitraan perikanan tangkap bagi kondisi ekonomi wilayah di Kecamatan Nusaniwe. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat : sebagai bahan informasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pembangunan perikanan.

METODOLOGI

Lokasi penelitian pada Kecamatan Nusaniwe Pulau Ambon. Waktu penelitian pada bulan Juni 2008 sampai dengan Januari 2009. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana data diperoleh dengan menggunakan *survey*. Pengumpulan data primer meliputi identitas responden (umur, pengalaman usaha dan pendidikan), diskripsi teknis dan ekonomi. Sedangkan data sekunder meliputi data-data pendukung yang diperoleh dari berbagai publikasi dan instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan *purse seine* peserta kemitraan di kecamatan Nusaniwe. Penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yakni sampel untuk nelayan pemilik sebanyak 7 orang (7 unit *purse seine*), sedangkan ABK sebanyak 87 orang.

Untuk menganalisis dampak kemitraan perikanan tangkap terhadap kondisi ekonomi wilayah digunakan kerangka Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix*) yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson (1989). Variabel yang dapat dianalisis dengan model PAM sebagai berikut : keuntungan privat (***Private Profit***), keuntungan Sosial (***Social Profit***),

Tabel 1. Kerangka Matriks Analisis Kebijakan (PAM)

Komponen	Penerimaan (Revenue)	Biaya (Cost)		Keuntungan
		Input Tradable	Domestik Faktor	
<i>HP</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>HS</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<i>PD</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>
Keterangan:	1. Keuntungan Privat (D)	= A-B-C		
	2. Keuntungan Sosial (H)	= E-F-G		
	3. Transfer Output (I)	= A-E		
	4. Transfer Input (J)	= B-F		
	5. Trasfer Faktor (K)	= C-G		
	6. Transfer Bersih (L)	= I-J-K		
	7. HP	= Harga Privat		
	8. HS	= Harga Sosial		
	9. PD	= Pengaruh Divergensi		

pengaruh Divergensi (*Effects of divergences*), rasio Biaya Privat (PCR), rasio Sumberdaya Domestik (DRCR), koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI), Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Koefisien Keuntungan (PCR), dan Koefisien Subsidi Produsen (SRP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Hasil penelitian terhadap nelayan pemilik pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa usia peserta relatif muda yaitu antara 20-69 Tahun. Hal ini disebabkan adanya pandangan dari pihak dinas kelautan dan perikanan Kota Ambon yang dalam hal ini diwakilkan kepada konsultan manajemen kota (KMK) bahwa pada kelompok usia tersebut masih produktif karena memiliki kemampuan fisik dalam melakukan pekerjaan melaut sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Tingkat pendidikan sebagai salah satu karakteristik individu yang cukup terkait dengan pengetahuan, ketrampilan dan produktivitas. Tingkat pendidikan mempengaruhi kerasionalan seseorang dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin rasional seseorang dalam mengambil keputusan dan akan semakin mudah untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan produktivitas usahanya.

Selain faktor pendidikan nelayan, pengalaman melaut juga mempunyai peranan yang cukup penting di dalam menunjang keberhasilan peserta dalam mengembangkan usaha penangkapannya. Nelayan yang sejak turun temurun berprofesi sebagai nelayan, diyakini lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan usaha penangkapan serta memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan yang sama sekali belum mempunyai pengalaman

khususnya dalam usaha penangkapan *purse seine*.

Hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan peserta kemitraan yakni ketua kelompok dan anggotanya memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan yang menyolok.

Terlihat bahwa baik ketua kelompok maupun anggotanya telah melewati jenjang pendidikan SD, dan ada yang pernah melewati jenjang pendidikan tinggi. Tabel 25 berikut ini menyajikan ragam tingkat pendidikan peserta kemitraan.

Tabel 2. Sebaran tingkat pendidikan nelayan *purse seine* di Kecamatan Nusaniwe

No	Tingkat Pendidikan	pemilik	%	ABK	%
1	Tidak pernah tamat SD	1	14,29	14	16,09
2	Tamat SD/ sederajat	2	28,57	48	46,60
3	Tamat SLTP/ Sederajat	3	42,85	22	25,29
4	Tamat SLTA/ sederajat	1	14,29	2	2,30
5	Perguruan Tinggi	-	-	1	1,14
Total		7	100	87	100

Sumber : Data primer diolah (2008)

Data pada Tabel 2, memperlihatkan bahwa persentase tertinggi tingkat pendidikan nelayan pemilik peserta kemitraan adalah pada jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (42,85 %) dan ABK pada jenjang Sekolah Dasar (46,60%). Dengan demikian dalam mengembangkan usaha penangkapan (dari sisi manajemen usaha) masih tergantung kepada pihak lain yakni tenaga pendamping desa (TPD) yang memberikan bimbingan dan pelatihan. Pengalaman melaut nelayan pemilik peserta kemitraan (dari 7 responden yang diwawancarai) menunjukkan bahwa rata-rata pengalaman melaut adalah 19 tahun sementara ABK rata-rata pengalaman melautnya adalah 8 tahun.

Deskripsi Teknis

Purse seine umumnya digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis kecil (layang, tongkol, kembung dan lain-lain). Perahu motor yang digunakan memiliki ukuran dengan panjang 11 – 19 m, lebar 2,75 – 4 m, tinggi 1 – 1,5 m dengan menggunakan 2 unit mesin motor berkapasitas 40 pk. Ukuran jaring yang digunakan umumnya adalah jaring dengan ukuran panjang 300 – 325 m, lebar 40 - 50 m. Anak Buah Kapal (ABK) *Purse seine* terdiri dari seorang nahkoda, seorang masinis dan 10 – 15 orang Tanase/Masnait. Pemeliharaan atau perawatan alat dilakukan setiap saat bila diperlukan. Jumlah tangkapan yang diperoleh tidak terlepas dari peranan umpan atau alat pengumpul yang disebut rumpon.

Rumpon berperan untuk mengumpulkan ikan sehingga mempermudah nelayan dalam proses penangkapan ikan.

Deskripsi Ekonomi

Investasi

Dalam memulai suatu usaha penangkapan diperlukan investasi awal, yang digunakan oleh pemilik untuk membeli barang modal

berupa perahu motor, motor penggerak, motor lampu, alat tangkap dan peralatan lainnya. Besarnya investasi awal yang dibutuhkan oleh tiap pemilik usaha *Purse seine* berbeda-beda tergantung jenis barang modal yang digunakan. Rata-rata nilai investasi awal usaha *Purse seine* di Kecamatan Nusaniwe, disajikan pada tabel 9.

Tabel 3. Rata-rata nilai investasi usaha *purse seine* peserta kemitraan

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Umur Ekonomis (tahun)	Nilai Depresiasi (Rp)	%
1.	Perahu Motor	37.000.000	10	3.700.000	34,6%
2.	Mesin Penggerak	17.600.000	10	1.760.000	16,4%
3.	Peralatan	50.000.000	8	6.250.000	46,7%
4.	Penangkapan Peralatan	1.900.000	8	237.500	1,8%
5.	Lampu	528.000	5	105.600	0,49%
	Jumlah	107.028.000	-	12.053.000	100%

Sumber : Data primer diolah (2008)

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya investasi terbesar yang dikeluarkan adalah untuk membeli peralatan penangkapan (jaring) sebesar 46,7%, kemudian perahu/kapal 34,6%, motor penggerak 16,4% dan lampu sebesar 1,8%. Besar biaya investasi tergantung daripada harga yang berlaku di pasaran.

Biaya variabel

Biaya variabel (*variable cost*) adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap operasi penangkapan yang jumlahnya selalu berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksi. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan pada usaha penangkapan

dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* adalah sebesar Rp.115.350. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh nelayan *purse seine* (KMP) adalah biaya bahan bakar, sedangkan ransum atau perbekalan untuk kegiatan penangkapan jarang dikeluarkan karena daerah penangkapan (*fishing ground*) yang letaknya hanya pada pesisir pantai dekat lokasi tempat tinggal serta operasi penangkapan dilakukan pada sore hari.

Rata-rata biaya operasional pada tiap musim berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh frekuensi melaut (*trip*) dari nelayan itu sendiri. Perbedaan

frekuensi melaut pada tiap musim disebabkan faktor alam, dalam hal ini kondisi alam (angin dan arus) yang mempengaruhi operasi penangkapan nelayan.

Biaya Tetap

Biaya Tetap (*Fixed Cost*) adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi yang ditanggung secara tetap oleh pemilik atau juragan tiap tahun. Biaya tetap berupa perawatan, administrasi, dan biaya

penyusutan serta potongan pengembalian. Untuk potongan pengembalian pinjaman nelayan harus membayar per tahun, besarnya sesuai dengan apa yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditambah dengan bunga per tahun sebesar 17%. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun. Biaya tetap dikeluarkan per tahun dengan besar nilai setiap unit berbeda, tergantung besarnya biaya pemeliharaan dan potongan atau cicilan pengembalian pinjaman. Biaya Tetap per unit usaha *Purse seine*, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Rata-Rata Biaya Tetap Usaha *Purse seine* di Kecamatan Nusaniwe Per Tahun

No	Jenis Biaya Tetap (Rp)				Total(Rp)
	Pemeliharaan	Adm.	Depresiasi	Pengemb. Modal	
Σ	4.900.000	1.500.000	96.381.000	102.124.687	168.790.187
\bar{x}	980.000	300.000	19.276.200	20.424.937,4	33.758.037

Sumber : Data Primer, diolah.

Total rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh nelayan *Purse seine* adalah sebesar Rp 33.758.037 yang terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan pengembalian pinjaman. Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya terbesar yang dikeluarkan yaitu pada biaya pengembalian pinjaman sebesar Rp 20.424.937 kemudian biaya penyusutan sebesar Rp 19.276.200 biaya pemeliharaan sebesar Rp 980.000, dan biaya administrasi sebesar Rp 300.000.

Dampak Kemitraan Usaha Perikanan Terhadap Ekonomi Wilayah

Pendekatan analisis dengan menggunakan Policy Analysis Matrix terhadap usaha perikanan *Purse seine* di Kecamatan Nusaniwe adalah dimaksudkan untuk melihat dampak proyek kemitraan terhadap kondisi ekonomi wilayah/masyarakat. Dalam analisa model PAM ini terdapat harga privat atau harga pasar dan harga sosial (*social price*). Harga privat adalah harga aktual yang diterima

nelayan dan didalamnya terdapat kebijakan pemerintah . Sedangkan harga sosial (*sosial price*) adalah harga yang tidak didistorsi oleh kebijakan pemerintah.

Keuntungan sosial dari usaha perikanan rakyat dan diketahui dari harga sosial atau harga bayangan (*shadow price*) yang menghilangkan dampak distorsi kebijakan pemerintah dan ketidaksempurnaan pasar. Perhitungan harga bayangan dalam penelitian ini sesuai dengan defenisi dari Gittinger (1999) dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan harga. Harga bayangan secara umum dilakukan dengan cara mengeluarkan

distorsi akibat adanya kebijakan *transfer of payment* seperti pajak, subsidi serta beberapa bentuk transfer lainnya. Sehingga keuntungan sosial adalah indikator atas keuntungan potensial atau keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari usaha penangkapan *purse seine*. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh distorsi kebijakan pemerintah dapat diketahui dengan menghitung selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial.

Hasil Matriks Kebijakan (Model PAM) usaha perikanan *Purse seine* pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perkiraan hasil perhitungan Matriks Analisis Kebijakan (Model PAM)

Komponen	Penerimaan	Biaya (Cost)		Keuntungan (<i>profit</i>)
		Input Tradable	Domestic Factor	
<i>Harga Privat</i>	1029105189 (A)	391440900 (B)	365080740 (C)	272583549 (D)
<i>Harga Sosial</i>	1091280000 (E)	391494900 (F)	365086740 (G)	343698360 (H)
<i>Pengaruh Divergensi</i>	-62174811 (I)	-54000 (J)	-6000 (K)	-71114811 (L)

- PRC = 0,57
- DCR = 0,52
- NPCO = 0,94
- NPCI = 0,99
- EPC = 0,91
- PC = 0,79
- SPR = 0,07

Tabel 5 memperlihatkan adanya perbedaan besarnya keuntungan nelayan dengan keuntungan sosial. Hal ini disebabkan

karena perbedaan harga dari output dan perbedaan biaya dari input yang diperdagangkan (*tradable input*) dan input

yang tidak diperdagangkan (domestic factor) antar negara. Perbedaan tersebut menghasilkan nilai efek divergensi keuntungan atau laba bersih sebesar Rp-71.114.811

Nilai efek divergensi bersih memberikan makna bahwa nelayan masih belum mampu menarik kelebihan keuntungan yang diterima oleh sosial (masyarakat). Ketidakmampuan nelayan mentransfer keuntungan sosial tersebut sebagai dampak kegagalan pasar dan kebijakan pemerintah.

Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya koefisien keuntungan (PC) yakni kurang dari satu sebesar 0,79. artinya bahwa nelayan mampu menarik keuntungan sebesar 79 persen dari keuntungan yang sebenarnya. Masih ada peluang bagi nelayan untuk dapat menarik keuntungan sebesar 21 persen bila kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan pemerintah dapat diatasi.

Kegagalan pasar yang dimaksudkan adalah terjadinya pasar *monopolistic*, dimana pembeli yang berhak menentukan harga (*price maker*) sementara nelayan hanya sebagai penerima harga (*price taker*). Pemerintah harus berperan dalam melakukan kontrol terhadap kondisi pasar, dan perlu ada kebijakan pemerintah yang tepat.

Kegagalan pasar dalam mentransfer harga output (hasil tangkapan ikan ketingkat nelayan sebagai akibat sifat usaha perikanan yang beresiko terhadap kondisi alam dan belum tersedianya sarana TPI (Tempat Pelelangan Ikan), sehingga mengakibatkan nelayan tidak memiliki *bargaining position* dalam menentukan harga.

Dampak kebijakan pemerintah dapat terlihat dari nilai *input tradable*. Jika transfer input negatif berarti nelayan mendapat bantuan subsidi dari pemerintah, sehingga dapat membeli input produksi yang lebih murah. Dan sebaliknya jika nilai *transfer input* positif berarti nelayan membayar harga input lebih besar dari harga sosialnya.

Dari hasil analisis juga terlihat bahwa nilai transfer input yang diperoleh adalah negatif (-5,400). Hal ini dapat dipahami oleh karena sebahagian besar input yang digunakan dalam usaha perikanan *purse seine* adalah bahan bakar minyak yang diperoleh dari subsidi pemerintah.

Nilai koefisien rasio subsidi (SPR) terhadap produsen (nelayan) sebesar 0,07 memberikan makna bahwa setiap nilai Rp 1000 yang ditawarkan untuk keperluan pembelian bahan bakar minyak, maka nelayan menerima subsidi sebesar

Rp.70.Sementara itu, nilai domestik factor yang negatif (-6000) menunjukkan nelayan membayar upah tenaga kerja (ABK) dibawah upah yang ditetapkan pemerintah (UMR)

Bila diperhatikan dari besarnya nilai transfer output yang cukup tinggi dan negatif yaitu Rp -62.174.811, maka ketidakmampuan nelayan dalam mentransfer keuntungan sosial menjadi keuntungan privat (nelayan) lebih dominan ditentukan oleh kegagalan pasar (*market failure*) dan bukan karena kegagalan kebijakan pemerintah.

Dari tabel terlihat nilai koefisien proteksi input nominal(NPCI) paling tinggi yaitu 0,99 kemudian koefisien proteksi efektif (EPC) sebesar 0,91 nilai koefisien rasio sumberdaya domestic (DRCR) sebesar 0,52 dan nilai koefisien proteksi output (NPCO) sebesar juga memiliki nilai 0,94

Nilai NPCI untuk input yang diperdagangkan (*tradable input*) pada usaha perikanan *Purse seine* sebesar 0,99 memberikan makna bahwa harga pasar dari input yang digunakan dalam usaha ini juga terkena pengaruh kebijakan. Atau dapat dikatakan nilai NPCI 0,99 mengindikasikan bahwa *transfer of payment* seperti pajak (*taxes*),pembatasan perdagangan (*trade*

restriction) dan penentuan nilai tukar yang tidak tepat (*inappropriate exchange rate*)

Nilai koefisien efektif (EPC) sebesar 0,91 atau (mendekati satu) menunjukkan makna bahwa ada insentif bagi nelayan (*positif insentif effect*). Artinya subsidi yang diberikan kedalam input dan output usaha perikanan *purse seine* diterima oleh nelayan.

Nilai koefisien rasio sumberdaya domestic (DRCR) sebesar 0,52 memberikan indikasi bahwa usaha perikanan *purse seine* mempunyai keunggulan komparatif untuk dikembangkan di *Kecamatan Nusaniwe*. Semakin jauh nilai DCRD dari satu memberikan gambaran lebih efisiennya penggunaan sumber daya dalam negeri untuk mengembangkan usaha perikanan *Purse seine*. Makna lain dari DRCR sebesar 0,52 adalah dengan mengembangkan usaha perikanan *purse seine* di dalam negeri, maka kita dapat lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya sebesar 48 persen dibandingkan bila kita mengimpor ikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Nilai koefisien nominal output (NPCO) sebesar 0,94 mendekati dari satu. Hal ini berarti telah terjadi *transfer output*. Oleh karena telah terjadi kebijakan pemerintah menyebabkan harga yang diterima oleh nelayan *purse seine* Kecamatan Nusaniwe lebih kecil dari pada

harga di pasaran dunia (sosial). Kecilnya nilai NPCO ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah seperti subsidi BBM, pajak, distorsi nilai tukar.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Program kemitraan yang dibangun memberikan dampak yang positif secara ekonomi maupun sosial terhadap nelayan peserta maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan *Policy Analisis Matrix*, dimana usaha penangkapan *purse seine* mempunyai keunggulan komparatif untuk dikembangkan dalam wilayah kecamatan Nusaniwe karena nilai privat profitnya = Rp 272.583.549, nilai sosial profitnya = Rp 343.689.360 dan nilai koefisien sumberdaya domestik < 1 (DRC = 0,52)

2. Saran

1. Pelatihan manajemen usaha perikanan dan penanganan hasil tangkapan perlu ditingkatkan bagi nelayan peserta kemitraan secara teratur dan berkesinambungan
2. Perlu adanya partisipasi baik dari nelayan dalam pengembalian dana pinjaman sehingga program ini dapat berjalan dengan baik
3. Fungsi pengawasan dari pihak LEPP-M3 maupun instansi terkait perlu

ditingkatkan agar program kemitraan dapat menjawab kebutuhan masyarakat nelayan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A, 1997. Ekonomi Organisasi dan Beberapa Aspek dari Analisis Ekonomi Biaya Transaksi. Materi Kuliah Sistem Organisasi Perdesaan Program Studi PWD. PPS IPB Bogor.
- Bachriadi, Dianto, 1995. Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital. Yayasan Akatiga. Bandung.
- Debertin, David L., 1986. Agricultural Production Economics. New York. MacMillan Publishing Company.
- Doll, John P dan Orazem Frank, 1984. Production Economics. Theory with Application. 2nd Edition. John Wiley and Sons Incorporated.
- Firth, R, 1966. Malay Fisherman: Their Peasant Economy. Edisi 2nd. London. Routledge dan Degan Paul.
- Gittinger, J. Price, 1986. Analisa Proyek-Proyek Pertanian. Edisi Kedua. Universitas Indonesia Press-Joh,s Hopkins. Seri Edisi Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta.
- Hannig, W. 1988. Towards a Blue Revolution: Socio-Economic Aspects of Brackish Water Pond Cultivation in Java. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Hobbs, J. E., 1997. Measuring the Importance of Transaction Cost in Cattle Marketing Amer. J. Agr. Econ.

- Hutabarat, J. 1996. Integrasi Vertikal Strategi Mitra Masa Kini. Manajeme Usahawan Bisnis Indonesia.
- Prawirokusumo. Soeharto. 1992. Kajian Konsep Kemitraan dan Keterkaitan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mirza, T.1996. Alliansi Strategi : Konsep Lama Kemas Baru. Manajemen Usahawan Bisnis Indonesia
- Monke, Eric A. dan Scot R Pearson, 1998. The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development. Cornel University Press. Ithaca and London.
- Schmid, A. A. 1987. Property, Power and Public Choice. An Inquiry Into Law and Economics. Second Edition. Praeger Publisher. New York.
- Schofield, John A, 1987. Cost-Benefit Analisis in Urban and Regional Planning London. Unwin Hyman.